



# Anggarkan Jalan Siduk Tiap Tahun

## Total Anggaran Jalan di Kalbar Rp330 Miliar

**PONTIANAK** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Barat (Kalbar) memberikan penjelasan soal penanganan ruas Jalan Siduk-Sukadana, Kabupaten Kayong Utara yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Plt Kepala Dinas PUPR Kalbar PUPR Kalbar Iskandar Zulkarnaen mengungkapkan

penanganan ruas jalan tersebut sejatinya selalu dianggarkan setiap tahun.

Soal pengusulan status

menjadi jalan nasional, menurutnya dilakukan pada Agustus 2018. Hal itu karena pemprov menyadari terbatasnya anggaran pelaksanaan peningkatan ruas Jalan Siduk-Sukadana. Dinas PUPR Kalbar pada 2018 merasa tidak dapat menuntaskan penanganan ruas tersebut secara maksimal, sehingga dirasa perlu dukungan oleh pemerintah pusat.

"Karena itu disampaikanlah usulan pada tahun 2018 melalui surat Sekretaris Daerah Nomor 050/2359/SPW-Bappeda. Salah satunya ruas Jalan Siduk-Sukadana diusulkan menjadi

ruas jalan nasional. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya, bahkan dukungan dana hanya pada 2018 melalui DAK," jelasnya.

Namun, berdasarkan catatan, Iskandar menyebutkan di tahun 2018 ruas jalan tersebut sempat dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp15,39 miliar untuk penanganan sepanjang 3,655 kilometer.

Kemudian pada 2019 kembali dianggarkan melalui APBD Kalbar sebesar Rp9,41 miliar untuk menangani sepanjang 2,310 kilometer. Lalu pada tahun 2020, dianggarkan kembali melalui APBD Kalbar sebesar Rp2,6 miliar untuk menangani sepanjang 906 meter.

Meski dalam masa pandemi Covid-19, ia mengatakan pada tahun 2021 jalan tersebut kembali dianggarkan melalui APBD Kalbar sebesar Rp10 miliar untuk menangani sepanjang 2,650 kilometer. Demikian halnya pada 2022 yang kembali dialokasikan melalui APBD Kalbar sebesar Rp15,7 miliar dengan rencana pen-

anganan efektif kurang lebih tiga kilometer.

Karena itu, Iskandar menegaskan bahwa pihaknya akan menuntaskan jalan tersebut sebagaimana yang menjadi semangat Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam pembangunan infrastruktur dan jalan khususnya. "Karena fokusnya Bapak Gubernur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur jalan, walaupun dengan keterbatasan anggaran, ruas Jalan Siduk-Sukadana setiap tahunnya tetap dianggarkan. Bahkan beliau menargetkan penanganan ruas jalan tersebut tuntas," katanya.

Untuk pengerjaan jalan tersebut di tahun ini, Iskandar mengungkapkan pihaknya sudah melakukan pemantauan lapangan pada 11 Mei 2022 lalu. Tujuannya dalam rangka meninjau pengerjaan jalan tersebut. Penanganan ruas jalan tersebut sejatinya sudah dimulai, namun pada H-7 Idulfitri sempat dihentikan mengingat kelancaran lalu lintas saat Lebaran.

"Peninjauan lapangan yang dilakukan itu sekaligus untuk meminta pihak pelaksana agar melakukan percepatan pengerjaan, mengingat kondisi jalan yang semakin buruk ditambah lagi kondisi cuaca yang kurang baik," ujarnya.

Ia mengakui, gubernur memang sangat fokus terhadap penanganan kebutuhan infrastruktur jalan. Hal ini ditunjukkan pada alokasi anggaran di Dinas PUPR sebesar Rp330 miliar untuk infrastruktur jalan dari total anggaran yang ada di dinas tersebut sebesar kurang lebih Rp380 miliar.

Dengan panjangnya ruas jalan yang harus ditangani, alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup. Karena itu pihaknya berharap dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan kondisi jalan di Kalbar. Terlebih lagi, kata Iskandar, cukup banyak wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalbar di Senayan dan menduduki posisi strategis dalam hal penganggaran pemerintah pusat.

"Kami berharap sekali adanya dukungan penuh untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur jalan di Kalbar umumnya



dan khususnya di ruas-ruas jalan yang rusak berat, ruas-ruas jalan dengan beban kendaraan berat yang melintas diperlukan penanganan yang maksimal," harapnya.

Sebab, lanjut dia, jika penanganan jalan tidak maksimal maka pembangunan yang dilakukan ibaratkan menggarami lautan. Belum tuntas penanganan jalan yang baru dibangun, akan rusak lagi akibat beban kendaraan yang berlebihan. "Untuk itu kami berharap sekali dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah infrastruktur jalan," pungkasnya.

Gubernur Kalbar Sutarmidji sebelumnya sempat membeberkan masalah pembangunan jalan di Kalbar yang cukup kompleks. Semua berawal dari saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar 2018-2023. Saat itu, Midji sa-paan akrabnya mengatakan pihaknya dihadapkan pada data jalan provinsi dalam kondisi mantap sudah 85 persen.

Namun, ia menyayangkan data tersebut ternyata tidak akurat. Ketika turun ke lapangan, masih banyak ditemukan jalan yang dalam kondisi tanah dan sebagainya. "Ternyata setelah kita validasi lewat Dinas PUPR yang dalam kondisi mantap itu 49 persen. Berartikan

jomplang itu akibat data kita tidak sinkron ya, sampai separuhnya," sesal dia.

Berikutnya dihitunglah perkiraan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk bisa menangani 51 persen jalan yang belum mantap itu. Didapatlah angka sebesar Rp6 triliun. "APBD kita tidak sampai Rp6 triliun, belum lagi belanja lain-lain. Jadi, satu tahun itu kemampuan kita antara Rp300 miliar sampai Rp800 miliar untuk jalan," katanya.

Jika demikian, perkiraan waktu untuk bisa menuntaskan semua jalan provinsi menjadi mantap, dibutuhkan sekitar delapan tahun anggaran. "Belum lagi bicara tentang menjaga tidak rusak dan lain sebagainya. Tambah lagi ada jalan provinsi yang diajukan ke pusat jadi jalan nasional tak ada keputusan, sampai jalan itu rusak kembali," terangnya.

Hingga 2021, Midji menyebutkan jalan provinsi dalam kondisi mantap sudah bisa mencapai 66 persen. Diperkirakan untuk tahun ini bisa mencapai sekitar 73 persen lalu ditambah tahun depan menjadi sekitar 78 persen.

"Jadi prediksi saya di masa jabatan saya bersama Pak Ria Norsan ini, hanya bisa memperbaiki jalan Kalbar dalam kondisi mantap antara 78 persen. Paling hebat itu 80 persen. Kalau misalnya (mau) lebih dari itu tidak mungkin, karena anggaran tidak tersedia. Tapi kalau data yang awal itu 86 persen benar, itu selesai,

tapi kan ternyata hanya 49 persen," tutupnya.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suib memberikan penjelasan terkait ruas Jalan Siduk-Sukadana yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat. Dia menjelaskan bahwa ruas jalan tersebut sudah dilakukan penanganan sejak 2018 hingga 2022.

"Tahapan penanganan ruas jalan Siduk-Sukadana sejak tahun 2018 sampai saat telah dilakukan penanganannya oleh Pemprov Kalbar," katanya dalam siaran pers. Menurut dia, pada tahun 2018 saja, sudah dilakukan penanganan oleh Pemprov Kalbar dengan mempergunakan DAK 2018 sebesar Rp15.393.900.000 sepanjang 3,655 km. Tahun 2019 dengan APBD Provinsi sebesar Rp9.410.990.000 dikerjakan sepanjang 2,310 km. Tahun 2020 dari APBD Provinsi kembali dianggarkan sebesar 2.600.000.000 sepanjang 906 meter.

Untuk tahun 2021, lanjutnya, kembali dianggarkan Pemprov Kalbar melalui APBD sebesar Rp10.000.000.000 sepanjang 2,650 km. "Sepengetahuan saya baru periode ini alokasi anggarannya konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan data, tahun 2022 ini APBD provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp15.700.000.000. Rencana tersebut kurang lebih mencapai 3 km," ujarnya.

Politisi Hanura Kalbar ini

mengapresiasi sikap Gubernur Kalbar yang berupaya melakukan pemerataan pembangunan walaupun tertatih-tatih sendirian. "Ini perlu dipahami semua masyarakat di Kalbar. Dengan keterbatasan anggaran pelaksanaan peningkatan ruas Jalan Siduk Sukadana, Dinas PUPR Provinsi Kalbar tidak dapat menuntaskan penanganan ruas tersebut secara maksimal. Maka diperlukan kehadiran dan dukungan pemerintah pusat, terutama dorongan dari teman teman yang berada di Komisi V DPR RI," ujarnya.

Suib menyebutkan tahun 2018 melalui surat Sekretaris Daerah Nomor 050/2359/SPW-BAPPEDA, salah satunya ruas Jalan Siduk-Sukadana diusulkan menjadi ruas jalan nasional (kewenangan pusat). Namun, faktanya sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. "Entah apa kendalanya. Saya kurang paham juga," ucapnya.

Dia menambahkan Gubernur Kalbar ke depan berencana menuntaskan penanganan ruas jalan tersebut. Tentunya dengan bertahap sebab ruas jalan yang harus dibangun ada pada 14 Kabupaten/Kota di Kalbar.

Berdasarkan hasil informasi di lapangan, pada 11 Mei 2022, pekerjaan ruas jalan sudah dimulai kembali setelah libur Idul Fitri. "Untuk H-7 lebaran Idul Fitri, sempat terhenti demi kelancaran lalu lintas Lebaran," katanya. **(bar/den)**